

INSPEKSI AGRARIA PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Medan, 19 Desember 1955.-

No. : 7979/Agr.-

K e p a d a

Lampiran 2 + 2

Isi : Penjelenggaraan
pembelian/pembebasan
hak tanah untuk ke-
perluan Negara.-

1. Para Residen di Propinsi Sumatera Utara
2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten seluruh Propinsi Sumatera Utara (tambah turunan untuk para Wedana Kowedanaan).-

Dengan hormat dipermaklumkan kepada Saudara bersama ini sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara sedia maklum dimasa yang akhir ini dari beberapa Djawatan/Dinas telah diterima permintaan supaya dapat kiranya disediakan atau diserahkan sesuatu bidang tanah untuk kepentingan Djawatan/Dinas guna dipergunakan, baik untuk tempat mendirikan kantor, maupun untuk tempat mendirikan rumah2 pegawai. Mendirikan rumah2 baru diakui sangat perlu hal mana adalah akibat dari kurangnya bangunan yang dapat digunakan untuk maksud itu, dan berhubungan pula dengan pesatnya perkembangan segala sesuatunya dalam pelbagai lapangan.
2. Dalam hubungan ini sering telah terdjadi lebih dahulu pembelian atau pembebasan hak tanah yang diperlukan itu yang dilakukan oleh Djawatan atau Dinas bersangkutan, dengan tidak mengindahkan pedoman dalam bijblad 11372 Jo.12746. Bijblad ini mengandung peraturan tjara bagaimana harus dilakukan oleh sesuatu instansi-resmi bila hendak mengadakan pembelian sebidang tanah, baik yang memakai hak Barat, maupun memakai hak milik Indonesia, ataupun hendak membebaskan hak yang ada diatas tanah tersebut. Salinan bijblad 11372 jo.12746 disertai dengan terdjemahannya dalam bahasa Indonesia disertakan bersama ini.
3. Dengan tidak mengindahkan aturan2 yang dimuat dalam bijblad 11372 jo.12746 itu maka penyelenggaraan penjerahan tanah itu kepada Kementerian c.q. Djawatan/Dinas yang menginginkannya, sesuai dengan apa yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1953 (L.N. tahun 1953 No.14) tidak saja menimbulkan kesulitan tetapi juga hal demikian mungkin sekali menimbulkan sajkwasangka yang tidak diinginkan dan membawa pula akibat kenaikan harga tanah yang tidak semestinya.
4. Karena ini maka Menteri Dalam Negeri (Bagian Agraria) dengan suratnya tgl. 30 Djuni 1952 No. Agr.40/15/24, yang untuk meringkaskan disertakan disini sakinnannya, kepada semua Kementerian telah diminta perhatiannya supaya kepada pejabat yang berkewajiban dari masing2 kementerian untuk mentaati peraturan2 tersebut dalam hal mereka mengadakan pembelian/pembebasan hak tanah itu guna kepentingan Djawatan/Dinasnya.
5. Peraturan dalam bijblad 11372 jo.12746 pada dasarnya menitik beratkan sesuatu pembelian tanah atau pembebasan hak tanah untuk kepentingan Negara adanya satu persetujuan tjara damai diantara pihak2 bersangkutan. Dan untuk ini harus diadakan satu panitia yang bertugas untuk menetapkan besarnya harga tanah atau ganti kerugian yang harus dibayar Pemerintah kepada pemilik2 tanah bersangkutan.

/ beberapa

Panitya itu ditetapkan atas permintaan pendjabat jang memmlukan tanah itu oleh Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur) terketjuali dalam hal luar bmasa oleh Kepala Pemerintahan Setempat, dalam hal ini Bupati, Kepala Daerah bersangkutan.

6. Berdasarkan apa jang diuraikan diatas dan untuk mempermudah, maka dengan ini dinjatakan, bahwa panitya pemeriksa tanah jang telah ditetapkan dengan surat keputusan saja tgl. 2 April 1953 No. 5/K/Agr. dapat ditugaskan untuk menjeleenggarakan segala sesutaunja jang berkenaan dengan pembelian atau pembebasan hak2 tanah jang akan dipergunakan untuk kepentingan sesuatu Djawatan/Dinas, dengan ketentuan bahwa panitya dalam mendjalankan tugasnja harus berpedoman kepada peraturan jang tersebut dalam bijblad 11372 jo. 12746.
Risalah pemeriksaan panitya harus diperbuat menurut tjontoh jang disematkan pada peraturan tersebut.
7. Dalam hal-hal jang luar biasa dimana dikedhendaki perlu adanya satu panitya khusus untuk menjelesaikan soal itu diminta supaya Saudara mengemukakan soal itu kepada saja disertai dengan pendjelasan serta usul2 Saudara.
8. Apa jang diuraikan diatas dapat kiranja diselenggarakan dan dituruti se-baik2nja, dan dimana didjumpai kesulitan2 hondaklah persoalannja Saudara kemukakan kepada saja.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
Kepala Bahagian Agraria,

d.t.o.

(M. Parlindoengan).-

REKAMAN dikirimkan kepada:

1. Menteri Agraria di Djakarta.
2. Semua Kepala Djawatan/Kantor di Propinsi Sumatera Utara untuk dimaklumi.-

Untuk salinan jang sama bunjinja
Djuru Tata Usaha,

(L. Rysma) -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTAKepada
Perdana Menteri
dan
Semua Menteri.

No. Agr.40/15/24.- Tanggal: 30 Djuni 1952.- Lampiran 1.-

Perihal: Menjelenggarakan pembelian/
pembebasan hak tanah untuk keperluan dinas.-

Bersama ini kami dengan hormat minta perhatian Saudara akan peraturan tersebut dalam Bijblad 11372 no.12746, dalam mana tertjantum prosedur yang harus dijalankan oleh sesuatu instansi resmi apabila mengadakan pembelian tanah (dengan hak Barat) atau pembebasan hak atas tanah (milik bangsa Indonesia). Kutipan dari peraturan tersebut mengenai beberapa hal2 yang penting kami lampirkan bersama ini.

Dalam bulan2 yang baru lalu ini telah terdjadi pembelian/pembebasan itu dengan tidak mengindahkan peraturan diatas, hingga tidak sadja mungkin sekali menimbulkan sjakwasangka yang tidak diinginkan, tetapi membawa pula akibat kenaikan harga tanah yang bukan semestinja, maka kami mengharap dengan sangat, sudi apalah kiranya Saudara memperingatn lagi para pendjabat yang berkewadajiban dari Kementerian Saudara, untuk menetapi peraturan2 tersebut dalam hal mereka mengadakan pembelian/pembebasan hak itu guna keperluan dinasnja. Perlu diketahui djuga oleh para pendjabat lain, bahwa dalam usaha membeli kembali tanah2 partikelir (particuliere landrijen), kami selalu berdja upaja mentjapai harga yang serendah-rendahnja.

/ ini

Tindakan surat kami sampaikan kepada para Gubernur/Residen dengan permintaan supaya berusaha, agar permintaan dari pihak instansi Saudara dapat diurus dengan segera; serta mengawasi, bahwa peraturan2 itu ditaati seperlunja.-

A.n.MENTERI DALAM NEGERI,
Kepala Bagian Agraria,
d.t.o.

Tindakan dikirimkan kepada: (S.Praptodihardjo) 1.c.

Semua Gubernur/Residen dengan permintaan supaya:

1. seterimanja surat ini peraturan tersebut dalam Bijblad 11372 dan 12746 itu ditindjau lagi dan dimana perlu segera ditundjuk angga2 panitia untuk tiap2 Kabupaten;
2. dibuat suatu pedoman bagi panitia2 itu untuk mendjamin yang semua permintaan dapat diselesaikan setcepat mungkin;
3. masalah ini diberitahukan kepada semua instansi yang berada dalam daerahnja;
4. memberitakan kepada kami kejadian2 yang menjimpang dari peraturan tersebut diatas.-

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
di- Medan.-Untuk salinan yang sama
bunjinja. Kepala Seksi V,
d.t.o.

(O.K.A. Muchtar).-

Untuk salinan dari salinan
Djuru Tata Usaha

djs.

Terdjemahan bijblad No. 11372 dan No. 12746.-

Peraturan tentang memperoleh penguasaan atas
tanah-tanah untuk keperluan Negara.

Pasal 1.

Penguasaan atas tanah² untuk keperluan Negara biasanya dilakukan dengan adanya perdamaian.

Djika, baik dengan sudah adanya pengumuman maupun tidak, bahwa berdasarkan undang² kepentingan umum menghendaki diambilnja sesuatu benda ataupun hak, Negara tetap perlu menguasai tanah, maka supaya diusahakan untuk mentjapai maksud itu adanya perdamaian dengan pemilik-pemilik bersangkutan dan orang-orang jang berhak.

Untuk itu harus diperhatikan peraturan-peraturan jang berikut.

Pasal 2.

Pembuatan peta-denah dan daftar-daftar menurut tjontoh A dan B.

(1) Pendjabat jang hendak menguasai tanah untuk keperluan Negara, berkewadjiban menentukan dengan peringgangingan batas-batas tanah-tanah jang diperlukan.

(2) Dia membuat peta-denah tanah-tanah itu jang djelas.

(3) Tiap lembaran peta-denah itu mesti bernomor, bertanggal dan ditandatangani, dan memuat nama daerah, afdeling dan bagian administrasinja, dimana tanah-tanah itu terletak, dan djuga maksud untuk apa tanah-tanah itu perlu dikuasai,

(4) (Diubah: Bijblad No. 12746). Pada satu lembaran hanya boleh dilukiskan tanah² jang terletak dalam satu kewedanaan atau Kabupaten.

(5) Tanah-tanah jang akan dikuasai diberi warna lain dipeta, jang mesti serupa pada tiap-tiap lembaran. Kelilingnja diberi tanda garis merah. Batas-batas setiap potong tanah jang masuk bagian tanah-tanah itu, jang disangka akan mendapat pengurusan tersendiri, dinjatakan dengan teliti. Tiap potong tanah itu diberi nomor berturut.

(6) (Diubah Bijblad No. 12746). Peta-denah mesti memuat semua hal ichwa² jang akan berguna untuk penguasaan atas tanah itu, seperti: peringgangingan tetap jang ada, djalan-djalan, djalanan air, bangun²an, perkuburan, perkebunan, kampung-kampung, sawah-sawah dan lain², djuga nama² dan batas² potongan desa atau daerah swatantra² jang dihentuk berdasarkan pasal-pasal 121, 123 dan 186 Indische Staatsregeling dan bagian-bagian administratif.

(7) Pada pembuatan djalan-djalan ~~kdjalan~~ kereta api, trem dan kendaraan), terusan dan jang serupa dengan itu maka garis-garis porosnja mesti dinjatakan dengan tanda-tanda tetap (piketten) jang perlu dengan warna merah pada peta-denah.

(8) Peta denah mesti setjara daftar memuat dengan ringkas:

- a. nomor-nomor berturut dari tanah-tanah;
- b. letaknja antara tanda-tanda tetap (piketten) dimaksud pada ruas 7;
- c. nama-nama mereka jang berhak atas tanah-tanah itu masing2, dan bangun2an serta tumbuh2an jang berada diatasnja, atau jang mempunjai hak-hak jang menjukarkan penguasaan itu;
- d. sifat hak-hak jang dimaksud pada c;
- e. djenis tanah (tanah sawah, tanah kampung, tanah pertanian, ladang d.l.l.);
- f. nomor-nomor perponding;
- g. luas setiap bidang tanah dengan meter budjur-sangkab, lagi pula dipisahkan menurut djenis disebut pada e;

(9) Lagi pula dibuat daftar-daftar terasing menurut tjontoh A dan B peraturan ini, jang menundjuk lembaran peta-denah bersangkutan. Dalam hal luar biasa boleh menjimpang dari tjontoh-tjontoh ini.

Pasal 3.

Permohonan untuk membentuk panitya.

(1) Pendjabat dimaksud pada pasal 2, dengan memberikan keterangan-keterangan umum jang perlu, meminta kepada Kepala Pemerintahan Daerah membentuk sebuah panitya jang berunding dengan pemilik-pemilik bersangkutan dan orang2 jang berhak, dengan wujud untuk menguasai tanah-tanah itu untuk keperluan Negara.

Dalam pada itu djika perlu dia boleh meminta supaja seorang atau lebih dari anggota2 panitya itu ditundjuk untuk memberikan bantuan dalam membuat daftar menurut tjontoh A dan B.

(2) (Diubah: Bijblad No. 12746). Di daerah-daerah luar Djawa dan Madura, djika keadaan luar biasa menghendakinja, umpamanya disebabkan amat kodjauhan, maka permintaan itu untuk mempertjepatkan, bolch disampaikan kepada Kepala Pemerintahan Setempat.

Pasal 4.

Susunan panitia.

Utusan anggota-anggota panitya.

(1) Kepala Pemerintahan Daerah atau dalam hal dimaksud pada ruas kedua pasal 3, Kepala Pemerintahan Setempat, membentuk untuk tiap2 Kewedanaan atau Kabupaten bersangkutan atau sekedar perlu untuk sebagiannja, sebuah panitya terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota.

(2) (Diubah: Bijblad 12746). Djika njata, bahwa penguasaan mesti dilakukan atas tanah-tanah jang letaknja dalam lingkungan batas sesuatu ibu-kota daerah, Kabupaten, Kewedanaan atau Kotjamatan atau Heminte atau Kotapradja atau djuga atas tanah-tanah, jang terhadapnja menurut peraturan-peraturan jang sah telah dibuat naskah-naskah hak tanah jang membuktikan pemindahan hak milik atau pemberian hak-hak benda atas tanah-tanah itu, kotjual gadai an, jang letaknja ditempat lain, maka sedapat mungkin seorang pegawai Pendaftaran Tanah, ahli Ukur Pemerintah, atau seorang jang menjelenggarakan pekerdjaan itu, diangkat menjadi anggota panitya.

(3) Djika diatas tanah-tanah jang diperlukan itu ada bangun2an berharga, maka ~~maka~~ ^{maka} pegawai ahli ditundjuk sebagai anggota.

(4) Djika mesti diaadakan perundingan tentang barang-barang jang sangat berharga atau hak-hak, maka sekiranya untuk itu ada alasan-alasan luar biasa, seorang ahli partikulir boleh djuga diangkat mendjadi anggota panitya itu.

Uang djasa untuk ahli ini ditetapkan lebih dulu dengan semufakat dengan pendjabat dimaksud pada pasal 2 oleh Kepala Pemerintahan Daerah dan ~~dibebaskan~~ ^{ditentukan} pada persediaan uang jang diuntukkan bagi pengambilan benda-benda atau pembebasan hak-hak.

(5) ~~Diubah~~: Bijblad No. 12746). Djika penguasaan itu mesti diaakukan atas tanah-tanah dalam keadaan luar biasa seperti tanah-tanah partikulir, milik sekaum, tanah-tanah perdikan, desa dan lain-lain, maka seorang pamongpradja jang mengetahui tentang keadaan luar biasa itu, mendjadi anggota panitya.

(6) Selain itu sebagai anggota-anggota panitya diangkat pegawai-pegawai, jang menurut pertimbangan Kepala Pemerintahan Daerah c.q. Kepala Pemerintahan setempat sanggup menentukan dengan tjukup teliti harga benda-benda jang diserahkan atau hak-hak jang ditanggalkan itu, dan mempertimbangkan serta memetjahkan kesulitan kesulitan jang mungkin ada,

(7) Panitya boleh mengutus seorang atau lebih dari para anggotanja untuk sesuatu pekerdjaan tertentu, tetapi panitya seluruhnja tetap bertanggung-djawab terhadap semua pekerdjaan dan keputusan dari anggota-anggota jang diutus itu. Panitya berhak memberikan petundjuk-petundjuk kepada anggota-anggota utusannja itu.

(8) Panitia atau utusannja dibantu oleh pendjabat dimaksud pada pasal 2 atau oleh pegawai lain jang ditundjuk oleh pendjabat tersebut. Pegawai ini menghadiri perundingan2 jang diadakan panitya untuk memberikan keterangan-keterangan dan nasehat; dia boleh menjampai-kan pendapatnja tentang pekerdjaan2 panitya kepada Kepala Pemerintahan Daerah c.q. Kepala Pemerintahan Setempat, jang sekiranya perlu bertindak mendjadi pengantara.

(9) Semua Dinas Pemerintah dan pegawai Negeri berke-wadajiban, sekadar tidak diwadjibkan merajasiakannja, memberikan kepada panitya keterangan-keterangan jang perlu.

Pasal 5.

Pengiriman peta-peta dan daftar2 kepada panitya.

Pendjabat jang tersebut, ^{pasal 2} mengirinkan ^{dalam} peta-denah dan daftar-daftar A dan B kepada Panitya.

Pasal 6.

Pengawasan dan penjelidikan jang dilakukan oleh panitya.

(1) Panitya memeriksa setjermat-tjermatnja keterangan keterangan jang telah ditjatat pada peta-denah dan daftar-daftar jang berhubungan, ketjuali djika keterangan-keterangan ini mengenai ukuran-ukuran dan perhitungan-perhitungan.

Kesalahan....

Kesalahan-kesalahan yang didapatinja dibetulkan oleh panitia tersebut; keterangan-keterangan yang tidak lengkap supaya diperlengkapinja.

(2) Apabila penguasaan harus diperoleh atas tanah-tanah untuk mana menurut Undang-undang telah diperbuat akte akte, yang membuktikan telah dilakukan pemindahan hak eigendom atau penetapan hak-hak benda, ketjuali beban hutang (credietverband) maka panitia harus berhubungan dengan pegawai-pegawai yang menjinpan akte itu untuk meyakinkan, bahwa tidak ada keberatan benda-benda tetap yang akan dibeli itu diserahkan kepada Negara, dan dju- ga supaya hak-hak yang berhubungan dengan itu dapat di- tjorong, atau untuk penghapusan ini diadakan tjatatan- tjatatan pada akte tersebut, dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil berhubungan dengan itu, Sebaiknja kepada pegawai Kahtor Pendaftaran Tanah atau ahli ukur Negeri atau pemangkunja sebagai anggota-utusan, khusus ditugaskan untuk penjelidikan itu, bila perlu dibantu oleh beberapa anggota lainnja.

(3) Akte-akte tersebut harus pula diperiksa, untuk mengetahui siapa-siapa pemiliknja, pemegang hak opstal, pemegang hak erfpacht, pemegang hipotik dan pemegang- pemegang hak lainnja, sampai dimana peraturan luar biasa itu berlaku bagi mereka, apakah mereka seharusnja menje- rahkan tanah2 yang diperlukan itu dengan tjuma2, ganti rugi apa yang harus mereka terima dan sebagainya. Harus diselidiki pula apakah masih ada pajak-pajak ta- nah dan beban-beban lain yang be, um dilunaskan.

(4) Terhadap tanah-tanah yang lainnja yang diperlukan, panitia harus berusaha untuk menyelesaikan tentang kedudukan hukum tanah-tanah itu, siapa-siapa yang mempunj ai hak-hak diatasnja, sampai dimana batas-batas hak itu apakah tanah itu dibebani dengan hutang (credietverband) apakah tanah itu digadaikan dan sebagainya.

Panitia harus memperhatikan pula seperlunja ten- tang keterangan-keterangan hasil tanah, daftar-daftar ta- tausaha yang lain dan surat-surat lain yang bersangkutan untuk mana panitia berhubungan dengan pegawai-pegawai dan pengetua dari penduduk yang dianggap tjakap untuk itu.

Pasal 7.

Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh panitia. Keputusan-keputusan yang diambil panitia.

(1) Dengan mengadakan permufakatan dengan pendjabat yang tersebut dalam pasal 2 atau penggantinya yang dimaksud dalam pasal 4 ruas 8, panitia atau utusannja yang terdiri dari pendjabat dua orang mengadakan perunding- an dengan pemilik dan pemegang-pemegang hak yang lain untuk mendapat persetujuan harga, yang harus di- bayar sebelum memindahkan atau penjerahan benda2 atau hak-hak itu dilakukan.

(2) Apabila tertjapai persetujuan, maka panitia berusa- ha supaya pemilik dan pemegang-pemegang hak lainnja itu, baik setjara lisan maupun tulisan menjatakan perse- tudjuannja, untuk, apabila Pemerintah mengingininja mendjaul benda2 tetap itu kepada Negara dengan harga yang telah dimufakatinja atau menjerahkan hak mereka atas benda-benda tetap itu untuk kepentingan Negara.

(3) Apabila tidak tertjapai persetudjuan, maka panitya atau utusannja menetapkan harga, jang menurut anggapannja dapat diberikan setinggi-tingginja.

(4) Mengenai harga-harga jang telah disetudjui, atau mengenai djumlah jang ditetapkan oleh atau atas nama panitya tersebut, dan tentang harga permintaan dari jang bersangkutan diadakan tjatatan-tjatatan didalam daftar A. dan B jang tersebut dalam pasal 2 ruas 9.

(5) Biasanja lamanja pembijtaraan untuk mentjapai persetudjuan tidak lebih dari satu bulan.

(6) Harga jang telah disetudjui itu dapat lebih tinggi daripada harga permintaan dari jang berkepentingan, asal saja telah njata bagi panitya atau utusannja, bahwa harga-permintaan itu djauh lebih rendah daripada harga jang sebenarnja dari benda-benda atau hak-hak jang harus diserahkan itu, atau daripada harga jang ditetapkan oleh orang-orang jang tidak tjakap, jang memang tidak dapat menaksir harga benda-benda atau hak2 itu.

(7) Panitya atau utusannja mengambil keputusan-keputusan dengan suara terbanjak.

Pendapat-pendapat para anggota jang djumlahnja ketjil, jang menjimpang daripada itu tidak diadakan tjatatan.

(8) Apabila tidak dapat diambil keputusan mengenai penetapan harga itu dengan suara terbanjak, maka apabila terdapat djumlah suara sandjil, diambillah taksiran tengah; apabila terdapat genap diambillah rata-rata kedua taksiran tengah itu.

Pasal 8.

Penjerahan peta-denah dan daftar-daftar oleh panitya kepada pendjabat jang dimaksud dalam pasal 2.

(1) Apabila panitya menganggap pembijtaraan2 itu telah selesai, maka ia mengirimkan kembali peta-denah jang telah diperlengkapi dan telah dibetulkan seperlunja disertai dengan daftar A dan B kepada pendjabat jang dimaksud didalam pasal 2, dengan memberikan keterangan singkat mengenai antara lain perobahan-perobahan apa dan tambahan-tambahan apa jang telah dilakukannja diatas peta-denah dan daftar A dan B itu, dan dengan pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang hak bersangkutan mana ia tidak dapat mentjapai persetudjuan.

(2) Didalam keterangan itu diuraikan pula tentang keberatan-keberatan jang dimajukan oleh jang berkepentingan terhadap penjerahan benda-benda atau penanggalan hak-hak itu kepada panitya.

Panitya berhak mengeluarkan pendapatnja mengenai hal itu dan berhubung dengan itu berhak pula meminta pertimbangan tentang perobahan2 didalam pekerdjaan jang akan dimulai atau didalam rentjana jang telah ada.

(3) Apabila setelah mengadakan perundingan ternjata bagi panitya, bahwa tidak ada kemungkinan mengambil benda-benda atau hak-gak itu untuk kepentingan Negara atau untuk memperoleh hak-hak itu, misalnja karena terlalu banjak keberatan-keberatan didalam pembuatan akte jang diperlukan, atau didalam pembuatan formaliteit-formaliteit lain maka ia menjatakan pendapatnja mengenai hal itu didalam keterangan jang tersebut diatas, dan ia mengemukakan pula keberatan2nja disertai dengan keterangan2 dan usul2 jang dianggapnja perlu kepada Kepala Pemerintahan Daerah.

(4) Kepala Pemerintahan Daerah berusaha memotjahkan kesulitan-kesulitan jang dimadjukan itu dan kemudian memberitahukan tentang hasil pekerdjaannya itu kepada pendjabat jang tersebut dalam pasal 2.

Pasal 9.

Penerimaan keputusan-keputusan Panitia oleh pendjabat jang tersebut didalam pasal 2.

Didalam hal-hal, dimana perundingan-perundingan berhasil dengan persetudjuan, maka pendjabat jang dimaksud didalam pasal 2 didalam batas-batas kekuasaannya berhak mendjalankan keputusan panitia itu, atau menerimanja meskipun ia tidak dapat menjetudjuinja..

Pasal 10.

Perdjandjian-perdjandjian jang diadakan oleh pendjabat jang tersebut dalam pasal 2.

(1) Apabila ia mendjalankan keputusan itu atau menerimanja, maka ia atau seorang pegawai lain jang ditundjuknja untuk itu, dapat dihadapan panitia atau sedikitnja dua orang anggota, baik setjara lisan ataupun tulisan mengadakan perdjandjian-perdjandjian dengan pemilik-pemilik dan pemegang-pemegang hak lain, dan membuat tjatatan-tjatatan mengenai hal itu didalam daftar A dan B.

(2) Apabila untuk memperoleh penguasaan atas sebidang ketjil tanah harus dihajar sedjumlah uang lebih dari Rp.10.000,- atau apabila panitia atau pendjabat jang tersebut didalam pasal 2 menganggap perlu, maka dapat diperbuatnja akte notaris mengenai persetudjuan itu.

(3) Panitia atau utusannya memperhatikan, bahwa, apabila untuk mengadakan persetudjuan diperlukan formaliteit2 jang diharuskan oleh undang2, keharusan itu harus dipenuhi dengan seksama.

Pasal 11.

Penjerahan dan sebagainya, didalam hal mana pembuatan akte atau formalitet2 lain tidak diharuskan oleh undang2.

(1) Apabila untuk penjerahan atau penanggalan benda-benda atau hak-hak itu pembuatan akte atau formalitet2 jang tidak diharuskan oleh undang2 (daftar2 B), maka pendjabat jang tersebut pada ruas (1) pasal jang lampau dengan segera, setelah diadakan persetudjuan, melakukan penjerahan djumlah uang jang telah disetudjui itu, Bersamaan dengan pembayaran itu maka penjerahan atau penanggalan benda-benda atau hak-hak itu dapat dilangsungkan.

(2) Tentang persetudjuan dan pembayaran djumlah uang dan penjerahan atau penanggalan benda2 atau hak2 itu diperbuat risalah dalam rangkap 4 menurut tjontoh C jang disematkan pada peraturan ini.

Apabila orang jang bersangkutan dapat menulis ia membubuhi tandatangannya sebagai tanda penerimaan.

(3) Panitia harus menjaksikan, bahwa tentang penjerahan atau penanggalan benda2 atau hak2 itu harus dibuat tjatatan-tjatatan seperlunya didalam daftar2 hasil tanah dan daftar tatauusaha lainnya.

Pasal 12.

Pasal 12.

Penjerahan dan sebagainya, didalam hal mana pembuatan akte atau formaliteit2 lain memang diharuskan oleh undang2.

Pembayaran jang dipertjepat didalam hal istimewa.

(1) Apabila untuk penjerahan atau penanggalan benda2 atau hak2 itu pemuatan akte atau formaliteit2 lain (balik nama, penghapusan hipotik d.l.l.) diharuskan oleh undang2 (daftar A), maka pendjabat jang tersebut dalam pasal 2 berusaha, agar segala sesuatu untuk itu dikerdjakan secepat mungkin.

(2) Untuk itu ia meminta kepada Kepala Pemerintahan Daerah untuk menundjuk salah seorang panitya, secepatnya seorang pegawai kantor Pendaftaran Tanah, ahli ukur Negeri atau pemangkunja, guna memberi bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan2 persiapan. Selebar daftar segera dikirimkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

(3) Menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang termaksud didalam Staatsblad 1908 No. 469, maka pendjabat jang tersebut didalam pasal 2 atau seorang pegawai balajangitundjuk olehnja, sekedar perlu bertindak sebagai wakil Pemerintah untuk membuat akte atau memenuhi formaliteit2 lain jang dibutuhkan.

(4) Pada pembuatan akte itu atau setelah formaliteit2 jang dimaksud itu dipenuhinja, ia membayar djumlah uang jang telah disetudjui itu dimuka panitya atau sedikitnja dimuka dua orang anggotanja kepada mereka jang berhak. Untuk pembayaran itu diperbuat tanda penerimaan didalam rangkap 4.

(5) Didalam keadaan2 istimewa, yakni apabila dengan pembayaran jang dipertjepat itu kerugian uang ada kepada Pemerintah, atau apabila kelamabatan pelaksanaan sesuatu pekerjaan jang tidak diinginkan dapat ditjegah, maka kekuasaan Pemerintah, setelah diikat perdjandjian jang dimaksud didalam pasal 10, akan tetapi dimuka waktu jang tersebut didalam ruas jang lampau dapat dilakukan pembayaran.

(6) Mengenai harga-harga pembelian sampai sedjumlah setinggi-tingginja Rp. 100.000,-, maka didalam keadaan jang sangat mendesak kekuasaan jang dimaksud dapat djuga diberikan oleh Kementerian atau Kepala Jawatan bersangkutan, dengan menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat.

(7) Kekuasaan itu diminta oleh pendjabat jang tersebut didalam pasal 2 dengan perantaraan Kepala Pemerintahan Daerah, setelah panitya menjatakan kejakinannja dengan surat, bahwa ia tiada menemui sesuatu kesulitan pada pembuatan akte-akte jang dimestikan atau didalam memenuhi formaliteit2 lain jang diharuskan oleh undang2.

(8) Didalam hal-hal jang tersebut pada ruas 5 dan 6 maka perdjandjian jang diikat itu harus sehantiasa disertai dengan kekuasaan jang tidak dapat ditjabut kembali kepada Pemerintah untuk mewakili kedua belah pihak didalam segala tindakan jang dianggap perlu pada pembuatan akte atau didalam memenuhi formaliteit2 itu.

Pasal 13.

Tjatatan2 didalam daftar A dan B.

Tanggal dan nomor risalah jang dimaksud didalam kedua pasal jang lampau, akte2 dan tanda2 penerimaan di-

- 8 -

Pasal 14.

Tindakan2 jang diambil apabila pendjabat jang tersebut didalam pasal 2 tidak menerima keputusan panitya.

(1) Apabila pendjabat jang tersebut didalam pasal 2 tidak menerima keputusan Panitya, atau apabila perundingan jang diadakan antara panitya dengan pihak2 jang berkepentingan tidak mentjapai persetudjuan, maka pendjabat tersebut, didalam batas2 kekuasaannjepegawaiannja berusaha untuk mengadakan persetudjuan jang diperlukan, dengan mengemukakan sjarat-sjarat lain dari pada sjarat2 jang telah disetudjui oleh panitya, ataupun dengan harga2 jang lain dari harga2 jang sudah ditetapkanja sebagaimana jumlah jang tertinggi, ketjuala bila Kepala Pemerintahan Daerah, jang bila perlu untuk itu dapat mengadakan penjelidikan, menaruh keberatan terhadap itu.

(2) Apabila Kepala Pemerintahan Daerah memang menaruh keberatan, dan walaupun pendjabat jang tersebut dalam pasal 2 ingin memberi djumlah jang lebih tinggi dari pada djumlah jang ditetapkan oleh panitya, maka pegawai jang tersebut terachib perlu mendapat kekuasaan dari Kepala Djawatannja.

(3) Setelah tertjapai persetudjuan jang tersebut dalam pasal ini, sedapat mungkin dipergunakan pasal2 10 s/d 13.

Pasal 15.

Usul untuk pentjabutan hak2 atau tindakan2 lainnja.

Apabila dengan djalan jang tersebut dalam pasal jang lampau tidak djuga terdapat persetudjuan, dan apabila ternyata ada banjak keberatan2 terhadap penjerahan atau penanggalan benda2 atau hak2 itu setjara damai, maka pendjabat jang tersebut dalam pasal 2 mengusulkan agar benda2 jang diperlukan serta hak2 jang ada diatasnja itu ditjabut ataupun diambil tindakan2 lain.

Pasal 16.

Pengiriman risalah peta-denah dan sebagainya kepada pembesar2 jang bersangkutan.

Risalah selengkapnja jang telah diperbuat disertai dengan peta-denah, daftar A dan B telah diisi jang disesat dalam pasal 10 dan 13 dan tanda2 penerimaan, disertai djuga dengan selambar salinan surat keterangan panitya jang tersebut pada ruas 1 pasal 8 diserahkan kepada Kepala Pemerintahan Daerah untuk disimpan diarsipnja. Selambar daftar jang telah diisi itu dikirimkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Selambar salinan peta-denah jang telah diperbaiki disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan atau kepada ahli ukur Negeri atau pemangunjja. Surat2 jang lain dan salinan2 sahih rkte2 tinggal pada pendjabat jang tersebut didalam pasal 2.

Pasal 17.

Pengawasan jang dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

(1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diwadfibkan melakukan pengawasan atas balik nama penjerahan barang2 dan hak2 jang dimaksud didalam pasal 2 atas nama Negera dan atas penjerahan serta pentjabutan tentang pembatalan hak2 jang diadakan.

(2) Pegawai Kantor Pendaftaran Tanah, ahli ukur Negeri atau wakilnya memberikan bantuan seperlunya untuk mengadakan persiapan balik nama barang atau hak, serta pengorengan dan pengurusan pembatalan hak. Akan tetapi pembuatan surat ukur dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan hendaklah lebih dulu dikerjakan dari pada pekerjaan lainnya.

(3) Apabila balik nama barang dan hak atau pengorengan atau pengurusan pembatalan hak didalam tiga bulan setelah penerimaan daftar A yang tersebut dalam pasal 12 ruas 2 belum dapat dilangsungkan, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah memberitahukan Kepala Pemerintahan Daerah dan pejabat yang tersebut dalam pasal 2 dengan menerangkan sebab-sebab terlambatnya, pemberitahuan ini diulangi tiap kali setelah dua bulan sampai dilangsungkan balik nama, pengorengan atau pengurusan itu atau setelah terlepas daripada hal itu.

Pasal 18.

Menentukan batas tanah yang diperoleh.

Batas tanah yang diperoleh segera ditentukan dengan diberi tanda oleh pejabat yang tersebut dalam pasal 2, ketjuali keadaan istimewa yang tidak mengizinkan.

Pasal 19.

Mengadakan perundingan dengan bantuan orang pengantara,

(1) Apabila untuk menjegah kenaikan harga atau spekulasi tanah ternyata, bahwa rentjana untuk membeli barang atau hak atau letaknya tanah yang dibutuhkan oleh Negara itu dianggap perlu dirahasiakan, maka dengan menjimpang dari ketentuan yang tertera didalam pasal yang lampau, pejabat yang tersebut dalam pasal 2, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pemerintahan Daerah dengan perantaraan seorang pengantara, dapat berusaha berunding dengan yang berkepentingan agar yang tersebut terakhir ini berunding sediaan menjerahkan atau memberikan tanah dan hak yang berada diatasnya, atau bangunan dan tanamannya yang berada diatasnya dengan harga yang tertentu.

(2) Setelah diadakannya perundingan itu, maka hendaklah peraturan yang tersebut didalam pasal yang lampau (setelah diroboh seperlunya) diikuti sebagaimana mestinya.

(3) Apabila panitia tidak dapat menerima perundingan yang tersebut diatas, maka dia menetapkan syarat, yang dengannya menurut pendapatnya dapat diadakan suatu perundingan untuk penyerahan atau pemberian barang atau hak itu.

Pejabat yang tersebut didalam pasal yang kemudian dapat berusaha dengan perantaraan orang pengantara tersebut diatas berdasarkan syarat tersebut berunding dengan orang yang bersangkutan untuk mengadakan suatu perundingan seperti yang dimaksud dalam pasal ini, ataupun mengadakan perundingan dengan mereka seperti dimaksud pada ruas 6 pasal ini.

(4) Bila perlu panitia itu dapat ditetapkan dengan surat keputusan rahasia.

(5) Uang jasa yang akan diberikan kepada orang pengantara itu ditetapkan sebelumnya oleh pejabat yang dimaksud dalam pasal 2 dengan persetujuan Kepala Pemerintahan Daerah dan dibebankan kepada fonds yang disediakan untuk pembelian barang2 atau hak2 itu.

(6) Didalam koddaan luar biasa pejabat yang tersebut dalam pasal 2 setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pemerintahan Daerah dapat pula memberi kuasa kepada orang pengantara untuk mengadakan perdjandjian bagi pembelian atau pembjaban harga tanah dengan bangun2an serta tanam2an yang berada diatasnja, setelah harga yang setinggi-tingginja yang boleh didjandjikan dan lain2 sjarat2 perdjandjian yang akan diikat ditetapkan, dan kemungkinan adanja formaliteit2 menurut undang2 yang akan dipenuhi, dipertimbangkan oleh suatu panitia yang djika perlu ditetapkan dengan surat keputusan rahasia, sebagaimana termaksud dalam pasal 4, atau setelah diperoleh kekuasaan dengan tjara yang tersebut didalam pasal 4 diatas untuk menjimpang dari keputusan panitia tersebut.

Apabila perdjandjian yang tersebut pada ruas yang lampau telah diikat, maka pejabat yang dimaksud memberitahukannja kepada Kepala Pemerintahan Daerah dan panitia bersangkutan, kemudian sedapat mungkin diikuti ketentuan2 yang tersebut didalam pasal 10 s/d 13 dan 16 s/d 18.

Pasal 20.

Ditambah dengan bijblad No. 12746.

(1) Dalam daerah susunan baru maka hak2 kekuasaan Kepala Pemerintahan Daerah tersebut dalam peraturan ini, pentjampuran tangan dan pekerdjaan2, dilakukan oleh Residen-Kepala afdeling, masing2 hanya mengenai daerah djabatannja.

(2) Dalam daerah susunan baru kekuasaan, dimaksud pada pasal 14 ruas 2, diminta dengan perantaraan Gubernur.

(3) Residen, Kepala-afdeling berkewadjiban memberikan laporan tertulis tentang pekerdjaan2nja yang terbit dari pasal2 12 ruas 7, dan 19 kepada Gubernur.-

D A F T A R

Benda2 dan hak2, ketjuali ikatan hutang untuk penjerahan atau pemberian, jang pembuatn akte atau formalitet2 lain diharuskan menurut undang2 (eigendon, erfpacht, opstal, eigendon agrarisch, tanah2 partikular dengan hak2 milik adonasi jang ada diatasnja dsb-nja)..

Nomor beresment pada peta tanah.	Nama tempat, dimana tanah itu terletak (Kabupaten, distrik, desa, marga, nama jalan atau lapangan dsb-nja).	Kedudukan hukum dari tanah (menjebut semua nama hak2 atas benda dan hak2 pribadi; eigendom, opstal, erfpacht, tanah partikulier dengan hak2 Indonesia yang ada diatasnja, hak pakai, pindjam-pakai, sewa, ikatan hutang, hak erfpacht yang berlaku terus, izin nenguh-suhai, hipotik, oegstverband dsb-nja).	Tanggal dan nomor dari akte2 yang memuat nama2 dari pemilik, dari akte2 hipotik, erfdienstbaarheden dsb-nja.	Nomor perponding	Nama2 pemilik dan orang2 yang berhak menurut akte2 untuk tiap bidang tanah atau hak tersendiri.	Nama2 orang2 yang berhak sebenarnya.	Luas tanah yang diambil dalam meter persegi.	Marga permintaan dari mereka yang berkepentingan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/5 6	lihat daftar B. Rajal. raja tanah hak ei- dari Kedi-gendom (sebagi- ri ke Wli-an), disewakan ngi desa tanpa tempo Mandiredjo, djanaka waktu distrik kepada A. F. Wlingi, Kab. Mulder. Blitar, Ke- residenan Kediri.	tanah hak ei- gendom (sebagi- an), disewakan tanpa tempo djanaka waktu kepada A. F. Mulder. tanah hak ei- gendom diberati dengan sesu- atu erfdienst- baarheid.	6 Agus- tus 1901 No. 36 surat perdjian djian Notaris tgl. 3 Sept. 1906 No. 38. 9-9-1901 No. 25 14-11- 1901 No. 38.	636	Evert Pieter- sen Jan van den Berg. Willem van den Berg.	ahli wa- ris dari Evert Pieter- sen Jan v/d Berg Tidak dikenal.	500	-
7	serupa	tanah hak ei- gendom diberati dengan sesu- atu erfdienst- baarheid.	9-9-1901 No. 25 14-11- 1901 No. 38.	459	Jan Jan sen Dja- karta	Jan Jan sen Djakarta	1400	Rp. 1800.-
18	lihat daftar B. distrik Tjiwari- ngin, Mr. Cornelis Keres. Djo- karta.	tanah partiku- liir (sebasian) dengan hak2 In- donesia dari Ali (sawah). Iram (sawah) Saidji (kebun) selandjutnja tanah perkong- sian.	16-8- 1879 No. 13.	65	Willem Meer- tens. Jan Meer- tens.	Willem Meer- tens, Jan Meer- tens.	500.- 1000.- 500.- 2300.- 1200.-	" 750.- " 200.- " 100.- " 200.- " 60.-
19	Desa Ku- dus dis- trik dst serupa dia atas (dahulu	hak erfpacht yang berlaku terus.	belum terdafa- tar.	-	-	Lie Tiauw Hian.	300.-	60.-

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Harga yang telah disetujui oleh panitia dengan yang berkepentingan.	Apabila tidak tertajapai persetujuan didalam menentukan harga yang setinggi-tingginya menurut taksiran panitia.	Bangunan dan tanaman yang ada diatasnya	Harga permintaan dari yang berkepentingan.	Harga yang telah disetujui oleh panitia dengan yang berkepentingan.	Apabila tidak tertajapai persetujuan didalam menentukan harga, harga yang setinggi-tingginya menurut taksiran panitia-lah yang diambil.	Keterangan ada tidaknya dibuat sesuatu perbandingan lisan atau tulisan dengan yang berkepentingan menurut pasal 10 peraturan dalam Bijblad No. 11372.	Tanggal dan nomor akte2 dsb-nya, pernah tidaknya untuk kepentingan Negara dilakukan pemindahan, penghapusan atau keterangan tentang pembatalan.	Tanggal dan nomor surat2 tanda pembayarannya yang telah dilakukannya.	Keterangan2 (surat2 ulur).
	Rp.500. satu rumah gedung dengan perkarangannya.		-	-	Rp.300.				Surat ukur 1 Juni 1904 No. 25. Sisa persil seluas 1200 m2 tidak terpakai. Tempat tinggal Jan v/d Berg tidak diketahui. Diusulkan untuk diotenti genen. Surat ukur tgl. 14 November 1900 No.45.
Rp.1600.	-	tidak ada gedung (6 pokok kelapa).	Rp. 30	60	-				
200.	-								
500.	-	-	-	-	-				Tidak ada surat ukur.
450	-	Ditanami padi, ditunai 1-4-serupa.	-	-	-				Perponding yang masih menunggu akan dilunaskan oleh pemilik tanah sebelum pengoperan dilakukan.
75	-	50 pokok kelapa 3 pk. bamboe	"315.	"315.					
200	-	ditanami karet	50	50.					
60	-	satu rumah gedung dengan perkarangannya	1400	2000.					Tidak ada surat ukur.

-Hs-

Model B.

D A F T A R

Benda-benda dan hak-hak, yang untuk pengedaran atau penanggulangannya pembuatan akte atau formalitet-formalitet lainnya tidak diharuskan menurut undang-undang, begitu djuga untuk credit verbond.

(Hak-milik dan hak pakai dsb-nja)

Nomor urut pada daftar.								
1	2	3	4	5	Nama-nama dari yang berkepentingan (untuk tiap-tiap hak sendiri-sendiri).		8	9
					Djenis hak	Nama dan apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di desa lain tempat tinggalnya.		
							Harga permintaan dari yang berkepentingan.	Harga yang telah disetujui oleh panitia dengan orang yang berkepentingan.
1	Desa Nga-diredjo, distrik Wlingi, Kab. Blitar	Milik bersama dengan saham tetap dipakai oleh Kro-mo.	sawah	1400	milik hak-pakai	Desa Ngadi-redjo. Kro-mo.	Rp. 70. 150.	50.- 125.-
2	Serupa	milik perseorangan, turun-temurun.	peka-rangan	300	milik gadai	Sumo. Wirjo.	" 50. 70.	20.- 70.-
3	Serupa	milik bersama dengan pembagian berkala (disewakan oleh desa kepada Garum untuk $2\frac{1}{2}$ tahun.	sawah	3500	milik hak-pakai dengan sewa	Desa Ngadi-redjo. Garum.	" - 200.	450.- 80.-
4	Serupa	milik tanah tidak sah dari Tjun Kian, terdaftar a.n. B. Narijan.	pekard-nean	600	milik tidak sah	Lie Tjun Kian dan mbok Mar-rijam.	" 160.	160.-

10	11	12	13	14	15	16	17
Apabila tidak tertjapai persetudjuan didalam menentukan harga, jang sel-tinggi2nja menurut taksiran panitia.	Keterangan tentang bangunan dan tana-man jang ada diatas tanah itu.	Nama jang berhd, dan apabila jang bersangkutan bertempat tinggal didesa lain djuga nama tempat tinggalnja.	Harga permintaan dari jang berkepen-tingan.	Harga jang telah disetudjui oleh panitia dengan jang berkepentingan.	Apabila tidak tertjapai persetudjuan didalam menentukan harga, jang sel-tinggi2nja menurut taksiran panitia-lah jang diambil.	Tanggal dan nomor risalah G.	Keterangan lain-lain.
tanaman padi dite nami tgl. 1-4-1925	Kromo						Dihitung Rp. 875,- tiap2 bouw.
satu ru- mah dari bambu 2 pokok ke- lapa, 3 po- hon petai tebu, dite- bang da- lam bl. Agustus 1925.	Sumo Wir- jo (pame- rang pand)	Rp. 300. 300.- " 100. 100.-					Kepada Cerum dibayar sekali gus sebagai ganti kerugian karena penghinaan perdjan- dian sedjuntah sewa satu tahun hasil po- nen. Blok Marjan setudju penggantian kerugian itu dibayar kepada Lie Tjun Kian. Jang tersebut terachir telah membayar Rp. 160.- untuk pembeli- an hd:2 milik Indo- nesia.
satu ru- mah dari bambu de- ngan pe- kerangan.	Lie Tjun Kian.						

Model C.

R i s a l a h

Pada hari ini, tanggal 19 . .
Tuan pekerdjaan
untuk ini telah ditunduk oleh
dihadapan kami
pekerdjaan
. pekerdjaan dan
. pekerdjaan
anggota2 panitija jang diangkat dengan surat-keputusan
tanggal 19 . . untuk memperoleh tanah bagi
kepentingan Negara untuk keperluan ,
telah mengikat suatu perdjandjian dengan mereka jang
berkepentingan jang tertara didalam daftar jang diserat-
kan pada risalah ini, untuk penjerahan atau penanggalaan
benda2 atau hak2, dan telah membayar harganja kepada
jang berkepentingan suatu djumlah jang tertara dibela-
kang nama2 mereka masing2, dan menerangkan, bahwa mereka
telah menerima penggantian kerugian itu dengan senang
hati, dan bahwa mereka sendjaja saat pembayaran rang
itu menganggap telah menjerahkan atau menanggalkan ben-
da2 atau hak2 itu kepada Negara, sepanjang mereka manu-
ruf daftar B tidak berhak untuk membongkar, memindahkan,
menuci atau menebang bangun2-an atau tanah2-an jang be-
rada diatas tanah itu.

Demikianlah risalah ini kami perbuat dalam rangkap
empat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Dikeluarkan untuk:

Diketahui oleh: Anggota2 panitija tersebut :

.
tersebut.

.

.

-Hs-

D a f t a r tentang perdjandjian2 dan djumlah2
uang jang telah dibayar untuk men-
peroleh tanah bagi kepentingan Negara
untuk keperluan
masuk mendjadi lampiran risalah anggo-
ta2 panitija jang diangkat dengan su-
rat-keputusan tanggal 19 .
bertanggal 19 , , .

Nomor dan tanggal peta de- nah dan daftar B.	No.urut dari bidang tanah.	Perdjandjian pengo- peran atau penjera- han dari :		Nama dan tempat tinggal dari jang berkepen- tingan	Djumlah jang telah dibayar.	Tanda tangan dari jang berke- penting
		Djenis hak	Keterangan mengenai banda dina- na terdapat hak itu.			
Lembaran 1 dari peta de- nah dan daftar B tanggal 19 Agus- tus 1924.	1	Hak mi- lik ber sama hak pa- kai.	m2 sawah. serupa	Desa Nga- diredjo.	50,-	
	2	Hak mi. lik per seorang- an jang turun temurun hak gadai hak mi- lik hak mi- lik	m2 pekara- ngan serupa rumah dari banbu 8 pokok kelapa	Sumo,serupa Wirjo,serupa Sumo serupa Pak Katjung serupa.	40,- 90,- 250,- 80,-	

Untuk pengesahan daftar ini.

Anggota2 panitija.

VOORSCHRIFTEN ONTRENT HET VERKRIJGEN VAN DE
VRIJE BESCHIKKING OVER TEN BEHOEVE VAN DEN
LANDE BENODIGDE GRONTEN.

Artikel 1.

Het verkrijgen van de vrije beschikking over voor den Lande benodigde gronden geschiedt als regel bij minnelijke overeenkomst.

Indien, al of niet in verband met een bij ordonnantie afgekondigde verklaring, dat het algemeen nut ontseigning van enig goed of recht vordert, het Land blijvendde vrije beschikking nodig heeft over grond, wordt getracht dat doel te bereiken bij minnelijke overeenkomst met de betrokken eigenaren en rechthebbenden. Daarbij worden de volgende voorschriften in acht genomen.

Artikel 2.

Opmaking van een grondkaart en van staten volgens de modellen A en B.

(1). De ambtenaar, die de vrije beschikking over grond ten behoeve van den Lande moet verkrijgen, draagt zorg, dat de grenzen van de benodigde gronden op het terrain door merktekens worden aangegeven.

(2). Hij doet van die gronden een duidelijke grondkaart samenstellen.

(3). Ieder blad van de grondkaart moet genummerd, gedagtekend en ondertekend zijn en vermelden het geveest, de afdeling en het administratieve onderdeel daarvan, waarin de gronden gelegen zijn, zomede het doel, waarvoor de vrije beschikking over die gronden nodig is.

(4). (Gew.: Bbl. 12746). Op één blad mogen slechts gronden voorkomen, gelegen in eenzelfde onder afdeeling of regentschap.

(5). De gronden, waarover de vrije beschikking moet worden verleend, worden op de kaart gedekt met een afzonderlijke kleur, welke op alle bladen dezelfde moet zijn.

De omtrek wordt met rode lijnen aangegeven. De grenzen van elk tot die gronden behorend grondstuk, waarover vermoedelijk afzonderlijk onderhandeld zal moeten worden, worden nauwkeurig aangegeven. Elk lezer grondstukken wordt een volgnummer voorzien.

(6). (Gew.: Bbl. 12746). Op de grondkaart moeten alle bijzonderheden voorkomen, welke voor het verkrijgen van de vrije beschikking over den grond van belang kunnen zijn, zoals: de aanwezige vaste merktekens, wegen, waterlopen, kunstwerken, bagiaatplaatsen, bebouwingen, kampen, sawahs, enz., zomede de namen en de grenzen der doorsneden dess's of andere Inlandse rechtsgemeenschappen, rechtsgemeenschappen ingesteld op den voet van de artikelen 121, 123 en 166 der Indische Staatsregeling en administratieve ressorten.

(7). Bij den aanleg van wegen (Spoor-, tram- of rijwegen), kanalen en dergelijke moeten de aslijnen daarvan met de nodige, vaste punten (piketten) op de grondkaart in rood worden aangegeven.

(3). Op de grondkaart moeten in staatvorm kettelijk worden vermeld:

- a. de volgnummers der grondstukken;
- b. de ligging tussen de in het zevende lid bedoelde vaste punten (piketten);

- c. de namen dergenen, die rechten uitoefenen op de onderscheidene grondstukken en daarop voorkomende opstallen en beplantingen of die houders zijn van rechten, welke de vrije beschikking daarover beperken;
- d. de aard van de onder e bedoelde rechten;
- e. de soort van den grond (sawah, kamponggrond, bouwterrein, tegalan enz.);
- f. de verpondingsnummers;
- g. de oppervlakte van elk grondstuk in vierkante laters en bovendien gesplitst in de onder e bedoelde soorten.

(9). Bovendien worden afzonderlijke staten opgemaakt volgens de bij deze regeling behorende modellen A en B., welke naar de betrekkelijke bladen der grondkaart verwijzen. Van deze modellen kan in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Artikel 3.

Verzoek tot aanwijzing van ene commissie.

(1). De in artikel 2 bedoelde ambtenaar verzoekt, onder verstrekking van de nodige algemene gegevens, het Hoofd van gewestelijk bestuur ene commissie te benoemen, welke met de betrokken eigenaren en rechthebbenden zal onderhandelen, ten einde ten behoeve van den lande de vrije beschikking over de benodigde gronden te verkrijgen. Zo nodig kan hij daarbij tevens het verzoek doen een of meer leden dier commissie aan te wijzen en behulpzaam te zijn bij het samenstellen van de staten volgens model A en B.

(2). (Gew.: Bbl. 12746). In de gewesten buiten Java en Madoera kan, indien bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld grote afstanden, zulks wenschelijk maken, het verzoek spoedshalve gedaan worden aan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur.

Artikel 4.

Samenstelling van de commissie.

Delegatie van commissieleden.

(1). Het Hoofd van gewestelijk bestuur of, in het geval bedoeld in het tweede lid van artikel 3, het Hoofd van plaatselijk bestuur, benoemt voor elke betrokken afdeling, of zo nodig voor een gedeelte daarvan, ene commissie van ten minste drie leden.

(2). (Gew.: Bbl. 12746). Indien blijkt, dat de vrije beschikking moet worden verkregen over gronden, welke gelegen zijn binnens de grenzen van de hoofdplaats van een gewest, afdeling, regentschap of onderafdeling of van een gemeente of stadsgemeente dan wel over elders gelegen gronden, waarvoor ingevolge wettelijke bepalingen akten zijn opgemaakt door welke de overgang van eigendom of de vestiging van zakelijke rechten, met uitzondering van credietverband, wordt bewerkstelligd, wordt zo mogelijk een ambtenaar van het landaster, een Gouvernementslandaster, of een als zodanig fungerende persoon, tot lid van de commissie benoemd.

(3). Indien op de benodigde gronden waardevolle bebouwingen voorkomen, wordt een deskundig ambtenaar als lid aangewezen.

(4). Indien onderhandeld moet worden over zeer waardevolle goederen of rechten, kan, indien daartoe bijzondere aanleiding bestaat, ook een particulier deskundige tot lid van de commissie worden benoemd. Het honorarium van dezen deskundige wordt door het Hoofd van gewestelijk bestuur te voren vastgesteld in overeenstemming met den in artikel 2 bedoelden ambtenaar en komt ten laste van de voor de overne-

der goederen of de vrijmaking van rechten beschikbare fondsen.

(5). (Gew.: Bbl. 12746). Indien de vrije beschikking moet worden verkregen over in bijzonderen rechtstoestand verkerende gronden als particuliere landerijen, familiebezit, gronden in perdikan dessa's enz. zal een bestuursambtenaar, die van bedoelde bijzondere toestanden op de hoogte is, van de commissie deel uitmaken.

(6). Overigens worden als leden van de commissie die ambtenaren aangewezen, welke naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, c.q. het Hoofd van plaatselijk bestuur, in staat zijn de waarde der over te dragen goederen of af te stane rechten voldoende nauwkeurig te bepalen en eventuele moeilijkheden te beoordeelen en op te lossen.

(7). De commissie kan voor bepaalde werkzaamheden een of meer harer leden delegeren, doch blijft in haar geheel voor alle handelingen en beslissingen van die gedelegeerde leden verantwoordelijk. Zij is bevoegd de gedelegeerde leden van instructies te voorzien.

(8). De commissie of de door haar gedelegeerde leden worden bijgestaan door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar of door een door dezen aan te wijzen anderen ambtenaar. Deze ambtenaar woont de door de commissie te houden besprekingen bij tot het geven van inlichtingen en advies; hij kan zijne bemerkingen omtrent de handelingen der commissie ter kennis brengen van het Hoofd van gewestelijk bestuur, c.q. het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat zo nodig beïndelend optreedt.

(9). Alle Landsdiensten en Landsdienaren zijn gehouden, voor zover niet tot geheimhouding verplicht, aan de commissie de nodige inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5.

Verstrekking van kaarten en staten aan de commissie.

De in artikel 2 bedoelde ambtenaar stelt de grondkaart en de staten A en B in handen van de commissie.

Artikel 6.

Door de commissie uit te oefenen controle en in te stellen onderzoekingen.

(1). De commissie controleert voor zoveel mogelijk de op de grondkaart en in de bijbehorende staten verstrekte gegevens voorzover deze geen afmetingen of berekeningen betreffen. Aangetroffen fouten worden door haar verbeterd; onvolledige gegevens worden door haar aangevuld.

(2). Indien de vrije beschikking moet worden verkregen over gronden waarvoor ingevolge wettelijke bepalingen akten zijn opgemaakt door welke de overgang van eigendom of de vestiging van zakelijke rechten, met uitzondering van creditverband, wordt bewerkstelligd, overtuigt de commissie zich, onder meer door raadpleging van de met de bewaaring van die akten belaste ambtenaren, dat bij overdracht de aan te kopen omroerende zaken zonder bezwaar ten name van den lande kunnen worden overgeschreven, den wel, dat de daartoe behorende rechten kunnen worden doorgehaald of het te niet gaan daarvan kan worden aangetekend op de desbetreffende akten, zonedat welke maatregelen in verband daarmede genomen zullen moeten worden. Bij voorkeur wordt de Ambtenaar van het Kadaster of de Gouvernementslandmeter of als zodanig fungerende persoon als gedelegeerd lid met dit onderzoek belast, zo nodig bijgestaan door een of meer andere leden.

(3). Ook worden de desbetreffende akten onderzocht om na te gaan wie de eigenaren, opstalhouders, arfpachters, hypotheekhouders en andere rechthebbenden zijn, in hoever voor hen bijzondere bepalingen gelden, of zij tot kosteloozen afstand van de benodigde gronden verplicht zijn, welke schadeloosstelling kun toekont enz. enz. Mede wordt een onderzoek ingesteld naar de afbetaling en de op de gronden rustende belastingen en andere lasten.

(4). Ten aanzien van de overige benodigde gronden tracht de commissie uit te maken in welken rechtstoestand deze verkeren, wie daarop rechten uitoefenen, welke onvang hunne rechten hebben, of op den grond credietverband is gevestigd, of deze verpand is, enz. Zij neemt zo nodig inzage van de landrantgegevens en van andere administratieve registers en bescheiden en raadpleegt daarvoor in aanmerking komende ambtenaren en hoofden en oudsten der bevolking.

Artikel 7.

Door de commissie te voeren onderhandelingen.
Beslissingen van de commissie.

(1). In overleg met den in artikel 2 bedoelden ambtenaar of zijn in artikel 4 lid (8) bedoelden vervanger opent de commissie of ene delegatie uit haar midden van minstens twee leden onderhandelingen met de eigenaren en andere rechthebbenden ten einde zo mogelijk tot overeenstemming te geraken over de prijzen, welke zullen worden uitbetaald voor de overdracht of den afstand van goederen of rechten.

(2). Indien overeenstemming wordt verkregen, tracht zij de eigenaren en andere rechthebbenden te bewegen zich eenzijdig mondeling of schriftelijk te verbinden om, indien zulke van Landwege mocht worden gevorderd, tegen den overeengekomen prijs die goederen aan het Land te zullen verkopen of van die rechten ten behoeve van het Land afstand te zullen doen.

(3). Indien geen overeenstemming wordt verkregen stelt de commissie of delegatie het bedrag vast, dat naar haar oordeel ten hoogste ware te basteden.

(4). Van de overeengekomen prijzen of van de door of namens de commissie vastgestelde bedragen en van den vraagprijs van den betrokkene wordt in de bij artikel 2 lid (9) bedoelde staten A en B aantekening gehouden.

(5). Als regel wordt niet langer dan een maand onderhandeld om tot overeenstemming te komen.

(6). De overeengekomen prijzen kunnen hoger zijn dan de vraagprijzen van belanghebbenden, indien aan de commissie of delegatie duidelijk blijkt, dat de vraagprijzen belangrijk lager zijn dan de werkelijke waarde van de over te nemen goederen of de af te stane rechten en de vraagprijzen gesteld zijn door onontwikkelde lieden, die klaarblijkelijk de waarde van de goederen of rechten niet kunnen beoordeelen.

(7). De commissie of delegatie neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Van daarvan afwijkende meningen van hare in de minderheid zijnde leden wordt geen melding gemaakt.

(8). Indien gene meerderheidsbeslissing kan worden verkregen ontrent enige prijsbepaling, geldt bij oneven aantal stemmen de middelste schatting, bij even aantal stemmen het gemiddelde van de middelste twee schattingen.

Artikel 8.

Aanbieding door de commissie van de aangevulde kaarten en staten aan den in artikel 2 bedoelden ambtenaar.

(1). Indien de commissie de onderhandelingen als geëindigd beschouwt, zendt zij de aangevulde en voor zoveel nodig verbeterde grondkaart en de staten A en B aan den in artikel 2 bedoelden ambtenaar bij een kort toelichtend schrijven terug, waarin o.a. wordt aangetekend, welke wijzigingen en aanvullingen zij in de grondkaart en de staten A en B heeft aangebracht en met welke eigenaren of rechthabbanden zij niet tot overeenstemming is gekomen.

(2). In dat schrijven wordt tevens melding gemaakt van de door de betrokkenen bij de commissie tegen de overdracht of den afstand van de goederen of rechten ingebrachte bezwaren. De commissie is bevoegd haar eigen opmerkingen op dit punt bekend te stellen en in verband daarmede wijzigingen in het te ondernemen werk of in de bestaande plannen in overweging te geven.

(3). Indien de commissie na afloop der onderhandelingen van oordeel is, dat niet tot overneming van goederen of rechten ten name van den Lande of tot het verkrijgen van den afstand van rechten ware over te gaan, bijvoorbeeld omdat aan de opmaking van de vereiste akten of de vervulling van andere formaliteiten te veel bezwaren verbonden zijn, deelt zij hare mening dienaangaande in evengenoemd schrijven mede en brengt bovendien hare bezwaren met de nodige inlichtingen en de voorstellen welke zij geraden acht, ter kennis van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

(4). Het Hoofd van gewestelijk bestuur tracht de zich voorgedaan hebbende moeilijkheden tot oplossing te brengen en geeft van het resultaat zijner bemoeiingen kennis aan den in artikel 2 bedoelden ambtenaar.

Artikel 9.

Aanvaarding van de beslissingen van de commissie door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar.

In de gevallen, waarin de onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid is de in artikel 2 bedoelde ambtenaar gerechtigd binnen de grenzen van zijn ambtelijke bevoegdheid de beslissing van de commissie te aanvaarden of daarin te berusten, ook al kan bij zich daarmede niet verenigen.

Artikel 10.

Het aangaan van overeenkomsten door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar.

(1). Voor zover hij die beslissing aanvaardt of daarin berust kan hij of een ander daartoe door hem aangewezen ambtenaar ten overstaan van de commissie, of van ten minste twee hare leden, met de daarvoor in aanmerking komende eigenaren en rechthabbanden de nodige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten sluiten, waarvan aantekening wordt gehouden in de staten A en B.

(2). Indien het voor de verkrijging van de vrije beschikking over een enkel grondstuk uit te betalen bedrag meer dan f.10.000.- beloopt of indien zowel de commissie als de in artikel 2 bedoelde ambtenaar zulks wenschelijk achten, worden van die overeenkomsten notariële akten opgemaakt.

(3). De commissie of haar gedelegeerde leden zien toe, dat, in de gevallen, waarin voor het sluiten ener overeenkomst wettelijk voorgeschreven formaliteiten nodig zijn, deze behoorlijk worden vervuld.

Artikel 11.

Overdracht enz. waarbij het opmaken van een akte of andere formaliteiten niet wettelijk zijn voorgeschreven.

(1). Indien voor de overdracht of afstand van goederen of rechten niet het opmaken van een akte of andere formaliteiten wettelijk zijn voorgeschreven (staten B), gaat de in lid (1) van het vorig artikel bedoelde ambtenaar onmiddellijk na het sluiten der overeenkomst tot uitbetaling van de overeengekomen bedragen over, Gelijkzeitig met de uitbetaling vindt overdracht of afstand van de betrekkelijke goederen of rechten plaats.

(2). Van het sluiten der overeenkomsten en het uitbetalen der gelden en de overdracht of afstand der goederen of rechten wordt een proces-verbaal in viervoud opgemaakt volgens het aan deze regeling gehecht model C. Indien de betrokkene de schrijfkunst machtig is tekent hij voor de ontvangst der bedragen.

(3). De commissie overtuigt zich, dat de overdracht of afstand van goederen of rechten zo nodig in de landrente - en andere administratieve registers wordt aangetekend.

Artikel 12.

Overdracht enz. waarbij het opmaken van ene akte of andere formaliteiten wel wettelijk zijn voorgeschreven. Vervroegde uitbetaling in uitzonderingsgevallen.

(1). Indien voor de overdracht of afstand van goederen of rechten het opmaken van een akte of andere formaliteiten (overschrijving, doorhaling van hypotheeken enz.) wettelijk zijn voorgeschreven (staten A), draagt de in artikel 2 bedoelde ambtenaar zorg, dat daarvoor zo spoedig mogelijk het nodige verricht wordt.

(2). Hij verzoekt daartoe het Hoofd van gewestelijk bestuur een der leden van de commissie, bij voorkeur een ambtenaar van het kadaster, gouvernementslandmeter of als zodanig fungerend persoon, aan te wijzen om hem bij de voorbereidende werkzaamheden behulpzaam te zijn. Een exemplaar van staat A zendt hij terstond aan het Hoofd van den Kadastralen dienst.

(3). Met afwijking in zover van het voorschrift in Staatsblad 1909 no. 469 treedt bij het verlijden van de akte of bij het voldoen aan de andere nodige formaliteiten de in artikel 2 bedoelde ambtenaar of een ander daartoe door hem aangewezen ambtenaar voor zoveel nodig als vertegenwoordiger van het Land op.

(4). Bij het verlijden van de akte of het voldoen aan bedoelde formaliteiten betaalt hij ten overstaan van de commissie of van ten minste twee haren leden de overeengekomen bedragen aan de daarop rechthebbenden uit. Van die uitbetaling worden quitanties in viervoud opgemaakt.

(5). In uitzonderingsgevallen, nl. indien door vervroegde betaling geldelijk nadeel voor den Lande of bepaald ongewenste vertraging van de uitvoering van enig werk voorkomen kan worden, kan met machtiging van de Regering, na het sluiten van de in artikel 10 bedoelde overeenkomst, doch vóór het in het vorig lid bedoeld tijdstip, tot uitbetaling worden overgegaan.

(6). Voor koopsommen tot een bedrag van ten hoogste f.100.000 kan in zeer spoedeisende gevallen bedoelde machtiging ook worden verleend door het betrokken Departements- of diensthoofd, onder nadere goedkeuring der Regering.

(7). De machtiging wordt door tussenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur gevraagd door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar, nadat de commissie schriftelijk zal hebben verklaard, dat zij zich overtuigd heeft, dat bij het

verlijden

(1). Indien voor de overdracht of afstand van goederen of rechten niet het opmaken van een akte of andere formaliteiten wettelijk zijn voorgeschreven (staten B), gaat de in lid (1) van het vorig artikel bedoelde ambtenaar onmiddellijk na het sluiten der overeenkomst tot uitbetaling van de overeengekomen bedragen over, Gelijkzeitig met de uitbetaling vindt overdracht of afstand van de betrekkelijke goederen of rechten plaats.

(2). Van het sluiten der overeenkomsten en het uitbetalen der gelden en de overdracht of afstand der goederen of rechten wordt een proces-verbaal in viervoud opgemaakt volgens het aan deze regeling gehecht model C. Indien de betrokkene de schrijfkunst machtig is tekent hij voor de ontvangst der bedragen.

(3). De commissie overtuigt zich, dat de overdracht of afstand van goederen of rechten zo nodig in de landrenten- en andere administratieve registers wordt aangegetekend.

Artikel 12.

Overdracht enz. waarbij het opmaken van een akte of andere formaliteiten wel wettelijk zijn voorgeschreven. Vervroegde uitbetaling in uitzonderingsgevallen.

(1). Indien voor de overdracht of afstand van goederen of rechten het opmaken van een akte of andere formaliteiten (overschrijving, doorhaling van hypotheeken enz.) wettelijk zijn voorgeschreven (staten A), draagt de in artikel 2 bedoelde ambtenaar zorg, dat daarvoor zo spoedig mogelijk het nodige verricht wordt.

(2). Hij verzoekt daartoe het Hoofd van gewestelijk bestuur een der leden van de commissie, bij voorkuur een ambtenaar van het kadaster, gouvernementslandmeter of als zodanig fungerend persoon, aan te wijzen om hem bij de voorbereidende werkzaamheden behulpzaam te zijn. Een exemplaar van staat A zendt hij terstond aan het Hoofd van den Kadastrelen dienst.

(3). Met afwijking in zover van het voorschrift in Staatsblad 1909 no. 469 treedt bij het verlijden van de akte of bij het voldoen aan de andere nodige formaliteiten de in artikel 2 bedoelde ambtenaar of een ander daartoe door hem aangewezen ambtenaar voor zoveel nodig als vertegenwoordiger van het Land op.

(4). Bij het verlijden van de akte of het voldoen aan bedoelde formaliteiten betaalt hij ten overstaan van de commissie of van ten minste twee hare leden de overeengekomen bedragen aan de daarop rechthebbenden uit. Van die uitbetaling worden quitanties in viervoud opgemaakt.

(5). In uitzonderingsgevallen, nl. indien door vervroegde betaling geldelijk nadeel voor den Lande of bepaald ongewenste vertraging van de uitvoering van enig werk voorkomen worden, kan met nachtiging van de Regering, na het sluiten van de in artikel 10 bedoelde overeenkomst, doch vóór het in het vorig lid bedoeld tijdstip, tot uitbetaling worden overgegaan.

(6). Voor koopsommen tot een bedrag van ten hoogste f.100.000 kan in zeer spoedeisende gevallen bedoelde nachtiging ook worden verleend door het betrokken Departements- of diensthoofd, onder nadere goedkeuring der Regering.

(7). De nachtiging wordt door tussenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur gevraagd door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar, nadat de commissie schriftelijk zal hebben verklaard, dat zij zich overtuigd heeft, dat bij het

verlijden

verlijden der vereiste akte of bij het voldoen aan andere wettelijk voorgeschreven formaliteiten zich geen moeilijkheden zullen voordoen.

(8). In de in de leden 5 en 6 bedoelde gevallen moet de gesloten overeenkomst steeds vergezeld zijn van een onherroepelijke machtiging op het Land om de wederpartij te vertegenwoordigen bij alle handelingen, welke voor het verlijden van de akte of het voldoen aan de formaliteiten noodig blijken nodig te zijn.

Artikel 13.

Aantekeningen in de staten A en B.

De gedagtekening en de nummers der in de vorige twee artikelen bedoelde processen-verbaal, akten en quitanties worden aangetekend op de desbetreffende staten A en B.

Artikel 14.

Gedragslijn indien de in artikel 2 bedoelde ambtenaar de beslissing der commissie niet aanvaardt.

(1). Indien de in artikel 2 bedoelde ambtenaar de beslissing van de commissie niet aanvaardt, zomede indien de door de commissie met belanghebbenden gevoerde onderhandelingen niet tot overeenstemming hebben geleid, kan genoemde ambtenaar binnen de grenzen van zijn ambtelijke bevoegdheid trachten de nodige overeenkomsten te sluiten op andere voorwaarden dan door de commissie zijn overeengekomen dan wel tegen andere prijzen dan door haar zijn vastgesteld als de uiterlijk te besteden bedragen, mits het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat zo nodig een nader onderzoek kan doen instellen, daartegen geen bezwaar heeft.

(2). Indien het Hoofd van gewestelijk bestuur wel bezwaar heeft en de in artikel 2 bedoelde ambtenaar niettemin prijzen wenst te besteden hoger dan de door de commissie vastgestelde bedragen, behoeft laatstgenoemde ambtenaar daartoe de machtiging van zijn Departementshoofd.

(3). Na het sluiten van de overeenkomsten bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 10 t/m 13 zoveel mogelijk toepassing.

Artikel 15.

Voorstel tot onteigening of andere maatregelen.

Indien ook op de in het vorig artikel bedoelde wijze geen overeenkomsten met belanghebbenden zijn tot stand gekomen, dan wel indien aan de minnelijk overdracht of afstand van goederen of rechten te grote bezwaren verbonden blijken te zijn, doet de in artikel 2 bedoelde ambtenaar het voorstel de benodigde goederen en de daarop rustende rechten te onteigenen of andere maatregelen te treffen.

Artikel 16.

Aanbieding van processen-verbaal, grondkaart enz. aan de betrokken autoriteiten.

Een stel van de opgemaakte processen-verbaal, met bijbehorende grondkaart, de ingevolge het bepaalde in de artikelen 10 en 13 aangevulde staten A en B en quitanties, alsmede een afschrift van het in het eerste lid van artikel 8 bedoeld schrijven van de commissie wordt aangeboden aan het Hoofd van gewestelijk bestuur ter opberging in zijn archief. Een van de aangevulde exemplaren van staat A wordt toegezonden aan het Hoofd van den Kadestralen dienst.

Een afschrift.

Een afschrift van de bijgewerkte grondkaart wordt gezonden aan het Hoofd van het betrokken Kadasterkantoor, dan wel den betrokken Gouvernementslandmeter of den als zodanig fungerenden persoon. De overige bescheiden met de grossen der opgemaakte akten blijven ter beschikking van den in artikel 2 bedoelden ambtenaar.

Artikel 17.

Door het Hoofd van den Kadastralen dienst uit te oefenen toezicht.

(1). Het Hoofd van den Kadastralen dienst is belast met het toezicht op de in artikel 12 bedoelde overschrijving van overgedragen goederen of rechten ten name van den Lande en de doorhaling en het aantekenen van het te niet gaan van rechten.

(2). De ambtenaren van het Kadaster, Gouvernementslandmeters of als zodanig fungerende personen verlenen voor de voorbereiding van de overschrijving van goederen en rechten en het doorhalen en het aantekenen van het tenietgaan van rechten zoveel mogelijk hun medewerking. Aan het opmaken der daarvoor benodigde meetbrieven en andere bescheiden wordt zoveel mogelijk voorrang boven andere werkzaamheden gegeven.

(3). Indien de overschrijving der goederen of rechten of de doorhaling of aantekening van het tenietgaan der rechten niet plaats heeft gehad binnen drie maanden na de ontvangst van den in artikel 12 lid 2 bedoelden staat a vestigt het Hoofd van den Kadastralen dienst daarop de aandacht van het Hoofd van gewestelijk bestuur en den in artikel 2 bedoelden ambtenaar onder uiteenzetting van de oorzaken der vertraging; deze mededeling wordt telkens na twee maanden herhaald, totdat de overschrijving, doorhaling of aantekening heeft plaats gevonden of daarvan is afgezien.

Artikel 18.

Vastlegging van de grenzen der verkregen gronden.

De grenzen der gronden welke ter vrije beschikking van den Lande zijn gekomen worden door de zorg van den in artikel 2 bedoelden ambtenaar door blijvende merktekenen aangegeven, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.

Artikel 19.

Het aangaan van overeenkomsten met behulp van tussenpersonen.

(1). Indien het ter voorkoming van prijsopdrijving en grondspeculatie gewenst blijkt de bestaande plannen tot aan- of akoop van goederen of rechten dan wel de ligging der ten behoeve van den Lande benodigde gronden geheel te houden, kan met afwijking van het bepaalde bij de voorgaande artikelen de in artikel 2 bedoelde ambtenaar, na verkragen instemming van het Hoofd van gewestelijk bestuur, trachten door middel van een tussenpersoon de belanghebbenden over te halen zich te verbinden om die gronden dan wel de daarop rustende rechten of de daarop voorkomende opstallen en beplantingen desgevorderd tegen een bepaalden prijs over te dragen of af te staan.

(2). Na het tot stand komen van die verbintenissen worden n.m. de voorschriften van de vorige artikelen gevolgd.

(3). Indien de commissie bedoelde verbintenissen niet aenvaardbaar acht, stelt zij de voorwaarden vast, waarop naar hare mening de overeenkomsten tot overdracht of afstand van goederen of rechten zouden kunnen gesloten worden. De in artikel 2 bedoelde ambtenaar kan den nader te trachten door middel van den tussenpersoon op den grondslag dier voorwaarden de belanghebbenden over te halen tot het aangaan van verbintenissen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, dan wel met hen overeenkomsten te sluiten als bedoeld in het zesde lid van dit artikel.

(4). Zo nodig kan de commissie bij geheim besluit worden ingesteld.

(5). Het aan den tussenpersoon uit te keren honorarium wordt vooraf door den in artikel 2 bedoelden ambtenaar, in overeenstemming met het Hoofd van gewestelijk bestuur, vastgesteld en komt ten laste van de voor de overneming of afkoop der goederen of rechten beschikbare fondsen.

(6). In zeer bijzondere gevallen kan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar na verkregen instemming van het Hoofd van gewestelijk bestuur mede den tussenpersoon machtigen om overeenkomsten te sluiten tot aankoop van gronden al dan niet met de daarop voorkomende opstellen en beplantingen dan wel tot aan- of afkoop van op die goederen rustende rechten, nadat de prijzen, welke ten hoogste zullen mogen worden toegezegd en de overige voorwaarden van de te sluiten overeenkomst zullen zijn vastgesteld en de mogelijkheid om aan wettelijk voorgeschreven formaliteiten te voldoen zal zijn beoordeeld door een, zo nodig bij geheim besluit in te stellen, commissie als bedoeld in artikel 4, dan wel nadat op de wijze bedoeld in artikel 14 machtiging is verkregen om van de beslissing der commissie af te wijken.

(7). Indien overeenkomsten als in het vorig lid bedoeld, zijn gesloten, geeft genoemde ambtenaar daarvan kennis aan het Hoofd van gewestelijk bestuur en de betrokken commissie. De bepalingen van de artikelen 10 t/m 13 en 16 t/m 18 worden daarna zoveel mogelijk gevolgd.

Artikel 20.

(Toegevoegd bij G.B. 8 Jan.1932 no.23 - Bijblad no.12/46).

(1). In het hervormde gebied worden de in deze voorschriften aan de hooven van gewestelijk bestuur opgedragen bevoegdheden, beoefeningen en verrichtingen uitgeoefend door de residenten-afdelingshoofd ieder voorzover zijn ambtsgebied betreft.

(2). In het hervormde gebied wordt de machtiging, bedoeld in artikel 14, lid 2, gevraagd door tussenkomst van den Gouverneur.

(3). De residenten-afdelingshoofd zijn verplicht terzake van hunne verrichtingen uit hoofde van de artikelen 12, lid 7 en 19 aan den Gouverneur schriftelijk verslag uit te brengen.

-Hs-

- 10 -

Model A.

Bijlage: 92.

S T A A T

VAN GOEDEREN EN RECHTEN, MET UITZONDERING
VAN CREDIETVERBOD, VOOR DE OVERDRACHT OF
AFSTAND WAARVAN HET OPMAKEN VAN EEN AKTE
OF ANDERE FORMALITEITEN WETTELIJK ZIJN
VOORGESCHREVEN.

(EIGENDOM, HIRFPACHT, OPSTAL, AGRARISCH EIGEN-
DOM, PARTICULIERE LANDELIJEN MET DAAROP RUS-
TENDE INLANDSE RECHTEN, ENZ.)

-----oOo-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Volgsnummer op de grondtekening.	Aanduiding v/d plaats waar de grond gelegen is (onder) afdeling, (onder) district, desa, marga, naam van straat of plein enz.)	Rechtstoestand v/d grond (vermelding van alle zakelijke en persoonlijke rechten, eigendom, opstal, erfpacht, particulier land met daarop rustende Inlandse rechten, gebruik, bruikleen, huur, erfdienstbaarheden, altijddurend recht van erfpacht, occupatievergunning, hypotheek, oogstverband enz.)	Dagtekening en nummer v/d gerechtelijke akten, waarin de namen der eigenaren zijn vermeld, van de gerechtelijke akten van hypotheek erfdienstbaarheden enz.	Verpondingsnummer	Namen der eigenaren en rechthebbenden volgens de gerechtelijke akten voor elk grondstuk of recht afzonderlijk.	Namen der werfelijke rechthebbenden	Over te nemen oppervlakte in vierkante meters.	Vraagprijs van den belanghebbende
1/5	Zie staat B grote weg va Kediri naar Wlingi, desa Ngadiredjo district Wlingi afdeling Blitar res. Kediri Idem	eigendomsperceel (gedeeltelijk), verhuurd zonder termijn aan A.F. Mulder.	6 Aug. 1904 No. 36 (Notariële huurovereenkomst) 3 Sept 1906 No. 38.	636	Fvert erfge-Pieter-sen van Jan v/d Fvert Burg Pieter-sen Willen v/d Burg Burg onbekend.		500	-
		eigendomsperceel bezwaard met een erfdienstbaarheid	9 Sept. 1901 No. 25.	459	Jan Jan-sen (Batavia)	Jan Jan-sen (Batavia)	1400	f.1800.
			14 Nov. 1901 No. 38.		Willem Klaasen (Sema-rang)	Willem Klaasen (Sema-rang)	-	" 200.
1 enz. 18	Zie staat B district Tjiwaringin afdeling Mr. Cornelis, res. Batavia.	particulier land (gedeeltelijk) met Inlandse rechten van Ali (sawah) Iram (sawah) Saidji (ruin) verder;	16 Aug. 1879 No. 13.	65	Willen Meertens Jan Meer-tens	Willen Meer-tens Jan Meer-tens	5000. 1000 500 2300	" 750. " 200. " 100. " 200.
19	desa Koe-does district enz. als boven part. land	Kongsigron den altijddurend erfpachtsrecht (voorm. Bekasi)	nog niet ingeschreven.	-	-	Lie Tiauw Hian	1200 300	" 60 " 60.

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Door de commissie met den belanghebbende overeengekomen prijs.	Ingeval geen overeenstemming is verkregen het bedrag, dat naar het oordeel van de commissie ten hoogste ware te besteden.	Bebouwingen en beplantingen, welke op het perceel voorkomen.	Vraagprijs van den belanghebbende.	Door de commissie met den belanghebbende overeengekomen prijs.	Ingeval geen overeenstemming is verkregen het bedrag, dat naar het oordeel van de commissie ten hoogste ware te besteden.	Mededeling of met den belanghebbende ene schriftelijke of mondelinge overeenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 10 der voorschriften in Bijblad no. 11372.	Dagtekening en nummer der gerechtelijke akten enz., waarbij ten behoeve van den lande overschrijving, doorhaling of aantekening van tenietruing heeft plaats gevonden.	Dagtekening en nummer der kwitanties van gedane betalingen.	Toelichtingen (Meetbrieven).
-	f500.	een stenen huis met aanhorigheden.	-	-	f3000				Meetbrief 1 Juni 1904 no. 25. De rest v/h perceel groot 1200 m2 is niet benodigd. Woonplaats van Jan v/d Burg is niet bekend. Voor onttegening voorresteld. Meetbrief van 14 November 1900 No. 45
-	"100								
f. 1600	-	onbebouwd 6 klappers	f. 30	f. 60	-				
" 200	-								
f. 500	-								
" 150	-	(beplant met padi op 1 april te oogsten.							Geen meetbrief. De nog verschuldigde verponding zal voor de overschrijving door de landsigenaren worden voldaan.
" 75	-	iden							Geen meetbrief opgemaakt.
" 200	-	50 klappers 3 bamboe stoelen	f. 315	f. 315	-				
60	-	beplant met rubber	" 50	" 50	-				
60	-	bebouwd met een stenen huis met aanhorigheden.	" 1400	" 2000	-				

-Hs-

Model B.

Bijlage: 92.

S T A A T

VAN GOEDEREN EN RECHTEN, VOOR DE OVERDRACHT
OF AFSTAND VAARVAN MET OPMAKEN VAN DE AKTE
OF ANDERE FORMALITEITEN NIET ZIJN V ORCE-
SCHREVEN; ZOALS VAN CRULSTVERBAND.

(INLANDSE BIZITS- EN GEDRUKSFOUTEN ENZ.)

-----oOo-----

Volgsnummer op de grondtekening	Aanduiding van de plaats, waar de grond gelegen is (desa, marga, district, onderafdeling, afdeling, gewest, straat of plein enz.)	Rechtsstoestand van den grond (erfelijk individueel bezit, communaal bezit met vaste aandelen of periodieke verdeling, ambtsweld, onverdeeld gemeente bezit, familiebezit, bijzondere rechtstoestand als in perdikan desa's, huur, verpanding, credietverband, onwettig grondbezit enz.)	Cultuurvorm (sawah, tegal, erf enz.)	Oppervlakte in vierkante meters.	Namen van den rechthebbende (voor elk recht afzonderlijk).		Vraagprijs van den belanghebbende.
					Aard van het recht	Naam en zo de betrokkene in een andere desa woont zijn woonplaats	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	desa Ngadiredjo, district Wlingi, afdeling Blitar.	communaal bezit met vaste aandelen in gebruik bij Kromo	sawah	1400.	bezit gebruiksrecht	desa Ngadiredjo, Kromo.	f. 70 " 150
2	idem	erfelijk individueel bezit (verpand).	erf	300.	bezit verpanding	Soemo Wirjo	" 50 " 70
3	idem	communaal bezit met periodieke verdeling, door de desa verhuurd aan de s.o. Garoem voor 21½ jaar.	sawah	3500.	bezit gebruiksrecht huur	desa Ngadiredjo, s.o. Garoem	f. - " - " 200
4.	idem	onwettig grondbezit van Lie Tjoen Kian stamde op naam van B. Marijam.	erf	600	onwettig bezit	Lie Tjoen Kian en Bok Marijam	" 160
12	Zie staat A						

8	9	10	11	12	13	14	15	16
Door de commissie met den belanghebbende overeengekomen prijs.	Ingeval geen overeenstemming is verkregen, het bedrag, dat naar het oordeel van de Commissie ten hoogste ware te besteden.	Omschrijving van de bebouwingen en beplantingen, welke op den grond voorkomen.	Naam van den rechthebbende (zo de betrokkene in een andere desa woont ook zijn woonplaats)	Vraaaprijs van den belanghebbende.	Door de commissie met den belanghebbende overeengekomen prijs.	Ingeval geen overeenstemming is verkregen, het bedrag, dat naar het oordeel van de commissie ten hoogste ware te besteden.	Datatekening en nummer van het proces Verbaal C.	Toelichtingen.
f. 50	-	-	-	-	-	-	-	Per bouw werd gerekend op f.875.-
" 125.	-	padiaar-Kromo plant op 1 April 1925 geoogst.	-	-	-	-	-	
f. 20.	-	een (Soemo bamboe (Wirjo huis (pand- 2 klaphouder) pers 3 petebomen	f.300	f.300	-	-	-	
" 70.	-		" 100	" 100	-	-	-	
50.	-	-	-	-	-	-	-	Aan de s.o. Caroen wordt als schade- loosstelling voor het ver- breken van het contract huur over één oogstjaar uitbetaald.
-	-	-	-	-	-	-	-	Het riet kan worden geoogst.
80.	-	riet, te s.o. Ga- oogsten roem in Aug. 1925	-	-	-	-	-	Bok Marijam keurt goed, dat de schadeloos- stelling geheel aan Lie Tjoen Kian wordt oit- gekeerd. Deze heeft f.160 be- taald voor af- koop der In- landse bezits-
" 160.	-	een Lie Tjoen Kian bamboe huis met aanho- righe- den.	f.1000	f.800.	-	-	-	

Model C.

Bijlage: 92.

P R O C E S - V E R B A A L.

Op heden den 19
heeft de Heer
van beroep , daartoe
aangewezen door
ten overstaan van ons van beroep
. , van beroep
en , van beroep ,
leden van de bij het besluit van den
van van 19
benoemde commissie voor het verkrijgen ten behoeve van den
Lande van de vrije beschikking over gronden benodigd voor
.
met de belanghebbenden vermeld in den aan dit proces-verbaal
gehechten staat, de aldaar omschreven overeenkomsten tot over-
dracht of afstand van goederen of rechten gesloten en heeft
hij aan elk dier belanghebbenden het achter hun naam gestelde
bedrag uitbetaald, waarna die belanghebbenden verklaard heb-
ben, dat zij naar genoegen zijn schadeloosgesteld en dat zij
de goederen of rechten vanaf het oogenblik der uitbetaling
van de gelden als aan den Lande overgedragen of afgestaan
beschouwen, voorzover hun blijkens staat B niet de bevoegdheid
is voorbehouden de op den grond voorkomende opstellen of beo-
lantingen op te ruinen, te verplaatsen, te oogsten of te
rooien.

En hebben wij hiervan opgemaakt dit proces-verbaal in
viervoud om te dienen waar zulks zal behoren.

	Afgegeven voor
Gezien :	De leden der commissie vd.,
De vd.,	
.	

Bijlage: 92.

S T A A T van gesloten overeenkomsten en uitbetaalde gelden voor
 verkrijgen ten behoeve van den Lande van de vrije
 beschikking over gronden benodigd voor
 behorende bij
 het proces-verbaal van de leden der bij het besluit
 van den van
 ddo 19 . . benoemde commissie, ge-
 dagtekend 19

Nummer en dagtekening v/h blad der grond- kaart en van staat E.	Volg- nummer v/h grond- stuk	Overeenkomst tot overdracht of af- stand van : aard omschrijving v/h v/h goed, recht waarop het recht wordt uitgeoefend.	Naam en voonplaats v/d belang be- hebbende.	Uitbe- taald be- drag.	Handte- kening v/d be- langheb- bende.
Blad 1 der grondkaart en staat E gedagtekend 12 Augustus 1924.	1	Commu- H2 sawah	desa Nga-	f. 50.-	
		naal bezits recht	diredjo		
		ge- iden	Kromo, de-	" 125.-	
	2	bruiks recht	sa Ngadi- redjo		
		erfe- H2 erf	Soemo iden	" 40.-	
		lijk indi- vidu- eel bezits recht			
	2	pand- iden	Wirjo iden	" 90.-	
		recht			
		bezits bamboe-	Soemo iden	" 250.-	
		recht huis			
		bezits			
		recht 8 klapper- bonen.	Pak Ka- tjoeng iden	" 80.-	

Voor de waarnerking van dezen staat
 De leden der commissie,